



Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 memuat Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran ( learning process ) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak , Februari 2019

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. REFILZA**

Pembina Utama Muda/ NIP.19630914 199103 2 003

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak ,                      Februari 2019

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. REFILZA**

Pembina Utama Muda/ NIP.19630914 199103 2 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.**

- Tugas Pokok

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai Lingkup Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 67 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Pejabat struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Fungsi Dinas Perikanan adalah :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Mengkoordinir aparatur perikanan dalam melaksanakan tugas.
- b. Mengkoordinir pelayanan umum di bidang perikanan.
- c. Memberikan fasilitas untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha di bidang perikanan.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan teknis di bidang perikanan.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian teknologi di bidang perikanan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang perikanan.
- g. Pelaksanaan kebijakan umum peningkatan kelembagaan perikanan, pembudidayaan perikanan serta permodalan.
- h. Pelaksanaan pengelolaan hasil perikanan.
- i. Pengawasan investasi perikanan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Perikanan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2018, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Lampiran I, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban –LO dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perikanan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Perikanan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari kedua ketentuan tersebut di atas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

## **5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan;
- Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD;
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- Kebijakan akuntansi; dan
- Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.
- Penjelasan atas informasi non keuangan.
- Penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGETKINERJA APBD

#### 1) Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Dinas Perikanan ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja secara efektif dan efisien.

Kebijakan keuangan Dinas Perikanan dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2018 meliputi hal berikut :

##### a) PENDAPATAN.

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Keuangan.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak berulang) yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan beruang atas penerimaan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan pendapatan.
- Pendapatan LO adalah Hak Dinas Perikanan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

##### b) BELANJA.

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada saat periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain – lain.

c) BEBAN

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

**2) Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dan DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Kota adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>658.723.000</b>	<b>641.957.587</b>	<b>97,45%</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000	3.198.000	99,93%
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	41.400.000	26.746.497	64,61%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	348.017.000	346.238.000	99,49%
4	Penyediaan alat tulis kantor	19.570.000	19.570.000	100,00%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.725.000	14.725.000	100,00%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.250.000	2.250.000	100,00%
7	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.960.000	20.700.000	98,76%

8	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.301.000	2.301.000	100,00%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.104.000	4.060.000	98,93%
10	Penyediaan makanan dan minuman	26.125.000	26.125.000	100,00%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	176.071.000	176.044.090	99,98%
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>190.503.800</b>	<b>189.339.150</b>	<b>99,39%</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89.450.000	88.345.550	98,77%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.553.800	6.546.600	99,89%
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	94.500.000	94.447.000	99,94%
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.374.900</b>	<b>100,00%</b>
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.375.000	3.374.900	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>57.533.450</b>	<b>57.451.400</b>	<b>99,86,%</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	49.732.200	49.693.000	99,92%
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.801.250	7.758.400	99,45%
<b>V.</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan.</b>	<b>2.809.465.775</b>	<b>2.799.593.400</b>	<b>99,65%</b>
1	Pengembangan Bibit Ikan unggul	642.698.500	641.361.900	99,79%
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	190.113.600	188.882.750	99,35%
3	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan	85.966.775	85.840.200	99,85%
4	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Tawar	330.223.250	323.461.000	97,95%
5	Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu	92.143.150	91.952.600	99,79%
6	Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan	1.413.191.500	1.413.019.500	99,99%



7	Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan	55.129.000	55.075.450	99,90%
<b>VI.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</b>	<b>74.032.050</b>	<b>73.739.300</b>	<b>99,60%</b>
1	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	74.032.050	73.739.300	99,60%
<b>VII.</b>	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.</b>	<b>418.159.075</b>	<b>266.021.300</b>	<b>63,62%</b>
1	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	263.263.825	182.541.700	69,34%
2	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	127.387.250	56.074.100	44,02%
3	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan	27.508.000	27.405.500	99,63%
<b>VIII</b>	<b>Program pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawa</b>	<b>615.445.842</b>	<b>552.107.100</b>	<b>89,71%</b>
1	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	237.115.100	235.995.600	99,53%
2	Pengembangan Kawasan dan Pelestarian sumberdaya perikanan	378.330.742	316.111.500	83,55%

Dari Delapan (8) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 93,92 %.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Perikanan melalui Balai Benih Ikan ( BBI ) Tarantang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putihah dan dari Retribusi penyewaan alat berat excavator direncanakan target Pendapatan sebesar Rp.280.400.000,00

Dari rencana penerimaan tersebut diatas realisasi pencapaian Penerimaan sebesar Rp. 145.000.000,00 atau 51,71%. Sedangkan untuk realisasi belanja terealisasi sebesar Rp. 6.991.749.308,00 atau 93,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.444.533.920,00.

**2) Pendapatan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, diperoleh realisasi Pendapatan sebesar Rp. 145.000.000,00 berupa Pendapatan dari Retribusi yang ditargetkan sebesar Rp. 280.400.000,00. Capaian Pendapatan Tahun 2018 dibandingkan dengan target dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1.****Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan Tahun 2018**

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Diatas/(Dibawah)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator)	180.850.000,00	122.050.000,00	(58.800.000,00)	67,49
Ret. Penj. Benih Ikan	99.550.000,00	22.950.000,00	(76.600.000,00)	23,05
<b>Jumlah</b>	<b>280.400.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>51,71</b>

**3) Belanja**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Belanja Dinas Perikanan meliputi belanja Pegawai, Barang Jasa dan belanja modal. Total realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 6.991.749.308,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp. 7.444.533.920,00.

Dari dua komponen belanja yang ada yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, pengeluaran terbesar berada pada Belanja Operasi. Komponen terbesar dari Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.449.176.171,00 atau 32,90 % dari total belanja sebesar Rp. 7.444.533.920,00. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 1.550.334.737,00 atau 20,83 % dari total belanja Dinas Perikanan. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 1.541.056.400,00 atau 20,70 %.

Pada Belanja Modal Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp.1.452.844.742,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.451.182.000,00 atau mencapai 99,89%

Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja Tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.

**Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja tahun 2018**  
(Pengelompokan berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Diatas/(Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
<b>Belanja Operasi</b>				
- Belanja Pegawai	2.658.359.328,00	2.449.176.171,00	92,13	209.183.157,00
- Barang dan Jasa	1.578.487.850,00	1.550.334.737,00	98,22	28.153.113,00
-Belanja Hibah	1.754.842.000,00	1.541.056.400,00	87,82	213.785.600,00
<b>Belanja Modal</b>				
- Tanah	1.216.702.742,00	1.215.186.000,00	99,88	1.516.742,00
- Peralatan dan Mesin	60.797.000,00	60.797.000,00	100,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	92.125.000,00	92.072.000,00	99,94	53.000,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.600.000,00	26.587.000,00	99,95	13.000,00
-Aset Tetap Lainnya	56.620.000,00	56.540.000,00	99,86	80.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.444.533.920,00</b>	<b>6.991.749.308,00</b>	<b>93,92</b>	<b>452.784.612,00</b>

**4) Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala dan hambatan yang begitu berarti.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.1 Entitas Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perikanan melalui Badan Keuangan Daerah.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan LRA Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam priode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis Akrual.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional ( LO ) dan Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ).

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

##### **1. Kas.**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal Neraca.

##### **2. Piutang.**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### 3. Investasi Jangka Pendek.

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka 6 bulan.

### 4. Persediaan.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

### 5. Investasi Jangka Panjang.

Secara umum, investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut ( at cost ).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan ( saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan ( Net Realizable Value ).

### 6. Tanah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dlm rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim /panitia pengadaan.

**7. Gedung dan Bangunan.**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**8. Peralatan dan Mesin.**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**9. Jalan, Irigasi dan Jaringan.**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**10. Aset Tetap Lainnya.**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak. Biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

**11. Kontruksi Dalam Pengerjaan.**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran. Biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### 4.4 Kebijakan Kapitalisir

1. Pengeluaran anggaran untuk belanja barang akan dikelompokkan ke dalam belanja modal apabila :
  - a) Barang yang dibeli memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
  - b) Pembelian barang tersebut tidak bersifat rutin.
  - c) Harga barang tersebut sama atau lebih dari Rp. 300.000,00 per satuan barang.
  - d) Harga barang kurang dari Rp. 300.000,00 per satuan tetapi memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Aset Ekstra Kompatibel).
  - e) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing – masing belanja pemeliharaan sebagai berikut :

<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp. 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	Rp. 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Rp. 10.000.000,00

#### 4.5 Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan pengelompokan masa manfaat sebagai berikut (disesuaikan dengan jenis aset tetap yang berada pada Dinas Perikanan) :

<b>KRITERIA ASET</b>	<b>MASA MANFAAT</b>
Alat Angkutan darat bermotor	7 tahun
Alat bengkel bermesin	10 tahun
Alat Kantor	5 tahun
Alat Rumah Tangga	5 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Alat Kedokteran	5 tahun
Alat Kesehatan	5 tahun
Alat Laboratorium	8 tahun
Gedung tempat kerja	50 tahun
Gedung tempat tinggal	50 tahun
Bangunan air bersih/baku	40 tahun
Instalasi air minum/air bersih	30 tahun
Jaringan Listrik	40 tahun



**4.6 Kebijakan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan dan renovasi (Overhaul).**

Tabel hanya menampilkan belanja pemeliharaan dan overhaul yang berada dan terjadi pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Persentase	Penambahan masa manfaat
Alat Angkutan darat bermotor	>0% s.d 25%	1 tahun
	>25% s.d 50%	2 tahun
	>50% s.d 75%	3 tahun
	>75% s.d 100%	4 tahun
Alat kantor dan rumah tangga	>0% s.d 25%	0 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	3 tahun
Alat Kedokteran dan Kesehatan	>0% s.d 25%	0 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	3 tahun
Peralatan Komputer	>0% s.d 25%	1 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	2 tahun
Bangunan gedung tempat kerja	>0% s.d 25%	5 tahun
	>25% s.d 50%	10 tahun
	>50% s.d 75%	15 tahun
	>75% s.d 100%	50 tahun

Bangunan gedung tempat tinggal	>0% s.d 30%	5 tahun
	>30% s.d 45%	10 tahun
	>45% s.d 65%	15 tahun
Bangunan air bersih/air baku	>0% s.d 30%	5 tahun
	>30% s.d 45%	10 tahun
	>45% s.d 65%	15 tahun

#### **4.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

##### **4.7.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA.**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima direkening Kas Umum Daerah ; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.7.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteri ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.7.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing- masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK- OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.7.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadinya pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

## BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 NERACA

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut, merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018. Kas pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari setoran Pendapatan Pajak Daerah tanggal 31 Desember 2018 berasal dari Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai nihil karena seluruh penerimaan telah disetor ke Bank/Kas Daerah pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.3	Piutang Pajak	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo piutang pajak pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.4	Persediaan	661.035.800,00	748.471.900,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

1.	Persediaan ATK	2.834.450,00	1.925.500,00
2.	Bahan obat-obatan	1.877.600,00	2.565.200,00
3.	Barang yg diserahkan ke Masy.	627.658.000,00	743.935.000,00
4.	Materai dan Leges	600.000,00	
5.	Sarana penunjang laboratorium		46.200,00
6.	Dan Lain-Lain (Benih Ikan pada BBI)	28.065.750,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>661.035.800,00</b>	<b>748.471.900,00</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.5	Tanah	2,147.873.150,00	2.147.873.150,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat penambahan nilai Aset Tanah pada Neraca per 31 Desember 2018, rincian sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal Tahun 2018	Rp	1.215.186.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.215.186.000,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Reklasifikasi ke Gedung & Bangunan	Rp	859.171.000,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	356.015.000,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.215.186.000,00</b>
<b>Jumlah Bersih Mutasi</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp.1.215.186.000,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018. Namun direklasifikasi ke Gedung & Bangunan dan Jalan, Irigasi & Jaringan. Belanja Modal Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Pembangunan/Rehabilitasi kolam calon induk dan kolam induk BBI Aia Putih senilai Rp.409.587.000,00.
- Pembangunan/rehabilitasi saluran air masuk dan keluar kolam BBI Aia Putih senilai Rp.111.866.000,00.
- Pembangunan/rehabilitasi kolam induk dan kolam pendederan BBI Tanjung Balik senilai Rp.230.158.000,00.
- Pembangunan/rehabilitasi saluran air masuk dan keluar kolam BBI Tanjung Balik senilai Rp.51.100.000,00.
- Rehab saluran BBI Tanjung Balik senilai Rp.23.505.000,00.
- Pembangunan/rehabilitasi kolam pemijahan dan pendederan BBI Tarantang senilai Rp.143.479.000,00.
- Rehab kolam BBI Tarantang senilai Rp.75.947.000,00.
- Pembangunan/rehabilitasi saluran air masuk dan keluar kolam BBI Tarantang senilai Rp.169.544.000,00.

b. Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Gedung & Bangunan sebesar Rp.859.171.000,00 terdiri dari :

1. Rehab kolam induk dan calon induk BBI Sentral di Aia Putih sebesar Rp.409.587.000,00 uraian sebagai berikut :

Dam Kolam 1	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 3	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 4	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 5	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 6	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 7	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 8	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 10	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 11	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 12	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 13	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 14	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 15	Rp.	61.022.000,00
Dam Kolam 16	Rp.	50.481.000,00

2. Rehab kolam induk dan kolam pendederan BBI Tanjung Balik senilai Rp.230.158.000,00, uraian sebagai berikut:

Kolam 6	Rp.	31.717.250,00
Kolam 7	Rp.	32.061.250,00
Kolam 9	Rp.	29.145.250,00
Kolam 10	Rp.	28.662.250,00
Kolam 11	Rp.	17.209.250,00
Kolam 14	Rp.	29.124.250,00
Kolam 15	Rp.	30.810.250,00
Kolam 16	Rp.	31.428.250,00

3. Rehab kolam pemijahan dan pendederan BBI Tarantang senilai Rp.143.479.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Kolam 4	Rp.	38.462.200,00
Kolam 6	Rp.	41.777.200,00
Kolam 7	Rp.	28.870.200,00
Kolam 8	Rp.	25.240.200,00
Kolam 10	Rp.	9.129.200,00

4. Rehab kolam BBI Tarantang sebesar Rp.75.947.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Kolam 13	Rp.	11.266.000,00
Kolam 25	Rp.	27.517.500,00
Kolam 26	Rp.	37.163.500,00

- c. Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.356.015.000,00, yang terdiri atas :
1. Rehab saluran air masuk pada BBI Aia Putih sebesar Rp.111.866.000,00.
  2. Rehab saluran E pada BBI Tanjung Balik sebesar Rp.51.100.000,00.
  3. Rehab saluran F pada BBI Tanjung Balik sebesar Rp.23.505.000,00.
  4. Rehab saluran air masuk dan keluar BBI Tarantang sebesar Rp. 169.544.000,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.6	Peralatan dan Mesin	7.698.561.892,00	7.652.061.892,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 46.500.000,00. Rincian penambahan nilai Aset sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal Tahun 2018	Rp	60.797.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>60.797.000,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Ekstra Komptabel Tahun 2018	Rp	5.015.900,00
- Belanja Modal tidak dikapitalisir	Rp	9.281.100,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>14.297.000,00</b>
<b>Jumlah Bersih Mutasi</b>	<b>Rp</b>	<b>46.500.000,00</b>

- a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.60.797.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018, yang terdiri atas :

Nama Barang		Harga Satuan	Total Harga
Mesin air (jet pump)	2 unit	2,500,000,00	5,000,000,00
Pinset anatomi	2 buah	132,000.00	264,000.00
Lumpung besar/alu	2 set	368,500.00	737,000.00
Reagen formalin	1 kit	2,508,000.00	2,508,000.00
Petridish uk 90x15	10 buah	41,800.00	418,000.00
Pinset splinter	2 buah	173,800.00	347,600.00
Gelas piala	6 buah	49,500.00	297,000.00
Rak tabung reaksi	1 buah	507,100.00	507,100.00
Batang pengaduk kaca	3 buah	29,700.00	89,100.00
Spatula with spoon	2 buah	165,000.00	330,000.00
Tabung reaksi 10 ml	20 buah	14,300.00	286,000.00
Gelas ukur uk 100 ml	2 buah	203,500.00	407,000.00
Gelas ukur uk 250 ml	2 buah	324,500.00	649,000.00
Blender	1 buah	737,000.00	737,000.00
Pisau set	2 set	275,000.00	550,000.00
Box sampel	12 buah	44,000.00	528,000.00

Timbangan digital	1	buah	265,000.00	265,000.00
Talenan	2	buah	41,800.00	83,600.00
Plastik sampel	3	buah	110,000.00	330,000.00
Tas cool box	1	buah	666,600.00	666,600.00
Dissolved Oxigen Meter (DO Meter)	1	unit	14,000,000.00	14,000,000.00
Ammonia Test Kit	1	unit	1,200,000.00	1,200,000.00
Pemanas ruang	2	paket	2,400,000.00	4,800,000.00
Happa larva	2	buah	105,000.00	210,000.00
Lukah	10	buah	22,500.00	225,000.00
Ijuk	11	ball	20,000.00	220,000.00
Papan	10	helai	45,000.00	450,000.00
Kayu	10	btg	32,500.00	325,000.00
Paku	2	kg	22,500.00	45,000.00
Terpal	3	lbr	312,500.00	937,500.00
Hannoch	26	buah	32,000.00	832,000.00
Fitting	4	buah	25,000.00	100,000.00
L	12	buah	1,250.00	15,000.00
Kabel	2	rol	200,000.00	400,000.00
Klem	2	buah	13,000.00	26,000.00
Tekong	6	buah	11,500.00	69,000.00
Tedos	4	buah	4,000.00	16,000.00
Stop kontak TB	3	buah	1,500.00	4,500.00
Stop kontak TP	4	buah	20,000.00	80,000.00
Saklar	2	buah	20,000.00	40,000.00
Pipa	8	btg	9,000.00	72,000.00
Batu aerator	10	buah	11,500.00	115,000.00
Blitz ICHT	5	buah	11,500.00	57,500.00
Cabang kontrol	10	buah	5,750.00	57,500.00
Dispenser	1	buah	1,500,000.00	1,500,000.00
Papan merk dinas	1	paket	20,000,000.00	20,000,000.00

- b. Aset ekstra komptabel tahun 2018 sebesar Rp.5.015.900,00 merupakan Belanja Modal tahun 2018 yang tidak dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdiri dari:

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Pinset anatomi	2	buah	132,000.00	264,000.00
Lumpung besar/alu	2	set	368,500.00	737,000.00
Pinset splinter	2	buah	173,800.00	347,600.00
Rak tabung reaksi	1	buah	507,100.00	507,100.00
Spatula with spoon	2	buah	165,000.00	330,000.00
Blender	1	buah	737,000.00	737,000.00
Pisau set	2	set	275,000.00	550,000.00
Box sampel	12	buah	44,000.00	528,000.00
Timbangan digital	1	buah	265,000.00	265,000.00
Talenan	2	buah	41,800.00	83,600.00
Tas cool box	1	buah	666,600.00	666,600.00



- c. Belanja Modal tidak dikapitalisir sebesar Rp.9.281.100,00 merupakan belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

Nama Barang		Harga Satuan	Total Harga
Reagen formalin	1 kit	2,508,000.00	2,508,000.00
Petridish uk 90x15	10 buah	41,800.00	418,000.00
Gelas piala	6 buah	49,500.00	297,000.00
Batang pengaduk kaca	3 buah	29,700.00	89,100.00
Tabung reaksi 10 ml	20 buah	14,300.00	286,000.00
Gelas ukur uk 100 ml	2 buah	203,500.00	407,000.00
Gelas ukur uk 250 ml	2 buah	324,500.00	649,000.00
Plastik sampel	3 buah	110,000.00	330,000.00
Happa larva	2 buah	105,000.00	210,000.00
Lukah	10 buah	22,500.00	225,000.00
Ijuk	11 ball	20,000.00	220,000.00
Papan	10 helai	45,000.00	450,000.00
Kayu	10 btg	32,500.00	325,000.00
Paku	2 kg	22,500.00	45,000.00
Terpal	3 lbr	312,500.00	937,500.00
Hannoch	26 buah	32,000.00	832,000.00
Fitting	4 buah	25,000.00	100,000.00
L	12 buah	1,250.00	15,000.00
Kabel	2 rol	200,000.00	400,000.00
Klem	2 buah	13,000.00	26,000.00
Tekong	6 buah	11,500.00	69,000.00
Tedos	4 buah	4,000.00	16,000.00
Stop kontak TB	3 buah	1,500.00	4,500.00
Stop kontak TP	4 buah	20,000.00	80,000.00
Saklar	2 buah	20,000.00	40,000.00
Pipa	8 btg	9,000.00	72,000.00
Batu aerator	10 buah	11,500.00	115,000.00
Blitz ICHT	5 buah	11,500.00	57,500.00
Cabang control	10 buah	5,750.00	57,500.00

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.7	Gedung dan Bangunan	9.509.529.551,00	8.573.397.551,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp.936.132.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal Tahun 2018	Rp	92.072.000,00
- Reklasifikasi masuk dari Tanah	Rp	859.171.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>951.243.000,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Belanja Modal tidak dikapitalisir	Rp	15.111.000,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>15.111.000,00</b>
<b>Jumlah Bersih Mutasi</b>	<b>Rp</b>	<b>936.132.000,00</b>

- a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.92.072.000,00 berupa pekerjaan rehab gedung kantor Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018. Namun yang dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp.76.961.000,00 setelah dikurangi dengan Belanja Modal Gedung Bangunan yang tidak dikapitalisir.
- b. Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp.859.171.000,00 yang terdiri dari :
1. Rehab kolam induk dan calon induk BBI Sentral di Aia Putihah sebesar Rp.409.587.000,00 uraian sebagai berikut :

Dam Kolam 1	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 3	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 4	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 5	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 6	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 7	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 8	Rp.	24.840.000,00
Dam Kolam 10	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 11	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 12	Rp.	23.149.000,00
Dam Kolam 13	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 14	Rp.	26.532.000,00
Dam Kolam 15	Rp.	61.022.000,00
Dam Kolam 16	Rp.	50.481.000,00

2. Rehab kolam induk dan kolam pendereran BBI Tanjung Balik senilai Rp.230.158.000,00, uraian sebagai berikut:

Kolam 6	Rp.	31.717.250,00
Kolam 7	Rp.	32.061.250,00
Kolam 9	Rp.	29.145.250,00
Kolam 10	Rp.	28.662.250,00
Kolam 11	Rp.	17.209.250,00
Kolam 14	Rp.	29.124.250,00
Kolam 15	Rp.	30.810.250,00
Kolam 16	Rp.	31.428.250,00

3. Rehab kolam pemijahan dan pendederan BBI Tarantang senilai Rp.143.479.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Kolam 4	Rp.	38.462.200,00
Kolam 6	Rp.	41.777.200,00
Kolam 7	Rp.	28.870.200,00
Kolam 8	Rp.	25.240.200,00
Kolam 10	Rp.	9.129.200,00

4. Rehab kolam BBI Tarantang sebesar Rp.75.947.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Kolam 13	Rp.	11.266.000,00
Kolam 25	Rp.	27.517.500,00
Kolam 26	Rp.	37.163.500,00

c. Belanja Modal tidak dikapitalisir sebesar Rp.15.111.000,00 merupakan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap berupa pekerjaan pengecatan gedung kantor Dinas Perikanan.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.1.8</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>4.543.927.200,00</b>	<b>4.161.325.200,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Terdapat penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp.382.602.000,00, rincian mutasi sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal Tahun 2018	Rp	26.587.000,00
- Reklasifikasi masuk dari Tanah	Rp	356.015.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>382.602.000,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Bersih Mutasi</b>	<b>Rp</b>	<b>382.602.000,00</b>

a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp.26.587.000,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun Anggaran 2018. Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan berupa pekerjaan pembangunan sumur bor di BBI Tarantang.

b. Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp.356.015.000,00 yang terdiri dari :

1. Rehab saluran air masuk pada BBI Aia Putih sebesar Rp.111.866.000,00.
2. Rehab saluran E pada BBI Tanjung Balik sebesar Rp.51.100.000,00.
3. Rehab saluran F pada BBI Tanjung Balik sebesar Rp.23.505.000,00.
4. Rehab saluran air masuk dan keluar BBI Tarantang sebesar Rp.169.544.000,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.9	Aset Tetap Lainnya	735.023.476,00	678.483.476,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.56.540.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal Tahun 2018	Rp	56.540.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>56.540.000,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Bersih Mutasi</b>	<b>Rp</b>	<b>56.540.000,00</b>

a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.56.540.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2018. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2018 terdiri dari :

1. Pengadaan induk ikan Nila sebesar Rp.32.500.000,00.
2. Pengadaan induk ikan Mas sebesar Rp.5.400.000,00.
3. Pengadaan induk ikan Nila Strain JICA sebesar Rp.14.640.000,00.
4. Pengadaan induk ikan Baung sebesar Rp.4.000.000,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.632.002.308,90)	(8.759.152.224,69)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(6.694.316.496,18)	(6.205.415.363,38)
2. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(1.340.510.012,72)	(1.182.572.977,98)
3. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(1.597.175.800,00)	(1.371.163.883,33)

Rincian akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki dan dikuasai Dinas Perikanan terlampir dalam Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.11	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	3.645.400,00	3.645.400,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2018.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.12	Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud)	2.650.000,00	2.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud) per 31 Desember 2018.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.13	Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi)	26.800.000,00	26.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) per 31 Desember 2018.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.15	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.270.938,00	2.004.435,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar kepada pemberi jasa berupa tagihan pemakaian listrik, air, internet, telfon serta koran tahun 2018 dan 2017 yang sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 belum dilunasi, yaitu :

-	Tagihan Rekening Listrik	850.178,00	876.086,00
-	Tagihan Rekening Air	158.690,00	134.510,00
-	Tagihan Rekening Internet	957.000,00	946.690,00
-	Tagihan Rekening Telfon	45.070,00	47.149,00
-	Tagihan Rekening Koran	260.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.270.938,00</b>	<b>2.004.435,00</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.1.16	Ekuitas	15.694.773.222,10	15.233.551.909,31

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

**5.2 LAPORAN OPERASIONAL**

<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>5.2.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
<b>5.2.1.1</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>133.150.000,00</b>
Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO dalam tahun 2018 dan 2017, yang terdiri dari :			
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.050.000,00	100.500.000,00
-	Retribusi Penjualan Benih Ikan	22.950.000,00	32.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>133.150.000,00</b>
<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
<b>5.2.2</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>6.530.527.995,21</b>	<b>8.704.448.729,67</b>
Jumlah tersebut merupakan Beban Operasi dalam Tahun 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :			
-	Beban Pegawai	2.449.176.171,00	2.737.185.734,00
-	Beban Barang dan Jasa	1.521.760.340,00	2.419.157.271,00
-	Beban Hibah	1.657.333.400,00	2.330.687.800,00
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	872.850.084,21	1.217.417.924,67
-	Beban Lain-lain	29.408.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>6.530.527.995,21</b>	<b>8.704.448.729,67</b>
<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>2.449.176.171,00</b>	<b>2.737.185.734,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam Tahun 2018 dan 2017, dengan rincian :			
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.961.645.142,00	2.347.680.984,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	446.520.029,00	261.401.750,00
-	Uang Lembur	41.011.000,00	128.103.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.449.176.171,00</b>	<b>2.737.185.734,00</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.2.2.2	<b>BEBAN BARANG JASA</b>	<b>1.521.760.340,00</b>	<b>2.419.157.271,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Barang Jasa dalam Tahun 2018 dan 2017, dengan rincian :

-	Beban Persediaan	185.960.800,00	325.980.947,00
-	Beban Jasa	867.688.450,00	1.251.595.072,00
-	Beban Pemeliharaan	3.600.000,00	957.500,00
-	Beban Perjalanan Dinas	464.511.090,00	840.623.752,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.521.760.340,00</b>	<b>2.419.157.271,00</b>

Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban alat tulis kantor-LO	23.520.600,00	33.801.750,00
-	Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO	2.050.000,00	2.900.000,00
-	Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	2.250.000,00	2.115.000,00
-	Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	6.771.000,00	5.958.000,00
-	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	2.946.600,00	2.187.600,00
-	Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO	45.216.000,00	17.200.200,00
-	Beban Penghargaan (Trofi, Plakat, Tabanas, Alat Elektronik)-LO	13.650.000,00	0,00
-	Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	1.400.000,00	650.000,00
-	Beban Bahan baku bangunan-LO	16.498.000,00	25.739.000,00
-	Beban Bibit ternak / ikan-LO	825.000,00	500.000,00
-	Beban Bahan obat-obatan-LO	10.187.150,00	16.235.700,00
-	Beban Bahan Material Pameran-LO	23.680.000,00	27.000.000,00
-	Beban Bahan Percobaan-LO	10.034.200,00	93.842.767,00
-	Beban Bahan Makanan Ternak-LO	26.932.250,00	97.850.930,00
	<b>Jumlah</b>	<b>185.960.800,00</b>	<b>325.980.947,00</b>

Beban Jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>BEBAN JASA KANTOR</b>	<b>35.538.000,00</b>	<b>35.531.974,00</b>
- Beban jasa telepon-LO	545.438,00	490.938,00
- Beban jasa air-LO	2.266.080,00	3.413.350,00
- Beban jasa listrik-LO	12.482.333,00	15.578.587,00
- Beban jasa surat kabar/majalah-LO	4.320.000,00	4.320.000,00
- Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO	11.459.149,00	9.360.099,00
- Beban jasa Laboratorium-LO	4.465.000,00	2.369.000,00
<b>BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>166.655.550,00</b>	<b>308.990.298,00</b>
- Beban jasa Jasa Service-LO	5.500.000,00	7.390.000,00
- Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	26.450.000,00	68.452.500,00
- Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	123.300.000,00	220.517.748,00
- Beban belanja Jasa KIR-LO	60.000,00	595.000,00
- Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.345.550,00	12.035.050,00
<b>BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN</b>	<b>34.885.400,00</b>	<b>47.721.300,00</b>
- Beban Belanja cetak-LO	10.588.000,00	17.840.000,00
- Beban Belanja Penggandaan-LO	23.337.400,00	28.468.800,00
- Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	960.000,00	1.412.500,00
<b>BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	
- Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO	1.500.000,00	
<b>BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR</b>	<b>9.287.500,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
- Beban Belanja sewa tenda-LO	9.287.500,00	13.500.000,00
<b>BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>47.327.500,00</b>	<b>58.685.000,00</b>
- Belanja makanan dan minuman rapat-LO	34.815.000,00	48.262.500,00
- Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	10.450.000,00	10.422.500,00
- Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	2.062.500,00	



<b>BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI- HARI TERTENTU</b>	<b>3.000.000,00</b>	
- Beban Belanja Pakaian Peserta-LO	3.000.000,00	
<b>HONORARIUM NON PNS</b>	<b>376.900.000,00</b>	<b>418.732.000,00</b>
- Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	5.875.000,00	
- Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO	925.000,00	
- Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	365.100.000,00	363.660.000,00
- Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO		36.872.000,00
- Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO		2.200.000,00
- Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mando r-LO		11.000.000,00
- Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik- LO	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>HONORARIUM PNS</b>	<b>192.594.500,00</b>	<b>368.434.500,00</b>
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa- LO	3.900.000,00	8.850.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	15.000.000,00	15.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO	11.400.000,00	11.400.000,00
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK- LO	99.800.000,00	100.800.000,00
- Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	21.000.000,00	21.000.000,00
- Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO	3.000.000,00	17.350.000,00
- Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO		90.632.500,00
- Beban Belanja sosialisasi-LO	24.701.500,00	21.375.000,00
- Beban Belanja bimbingan teknis-LO	13.793.000,00	82.027.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>867.688.450,00</b>	<b>1.251.595.072,00</b>

Beban Pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	3.600.000,00	957.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>957.500,00</b>

Beban Perjalanan Dinas dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	226.295.000,00	269.015.000,00
-	Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	238.216.090,00	571.608.752,00
	<b>Jumlah</b>	<b>464.511.090,00</b>	<b>840.623.752,00</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.2.2.3	<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>1.657.333.400,00</b>	<b>2.330.687.800,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah Dinas Perikanan dalam Tahun 2018 dan 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.2.2.4	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>872.850.084,21</b>	<b>1.217.417.924,67</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2018 dan 2017. Dengan uraian sebagai berikut :

-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	488.901.132,80	859.816.732,79
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	157.937.034,74	171.899.875.,22
-	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan	226.011.916,67	185.701.316,66
	<b>Jumlah</b>	<b>872.850.084,21</b>	<b>1.217.417.924,67</b>

Untuk lebih rincinya uraian penyusutan dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.2.2.5	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>29.408.000,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain dalam Tahun 2018 dan 2017, yang terdiri atas Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dan Aset Ekstrakomptabel Tahun 2018. Dengan uraian sebagai berikut :

- Belanja Modal Gedung & Bangunan tidak dikapitalisir sebesar Rp.15.111.000,00 merupakan pekerjaan pengecatan dinding kantor Dinas Perikanan.
- Belanja Modal Peralatan & Mesin tidak dikapitalisir sebesar Rp.9.281.100,00 merupakan belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

Nama Barang		Harga Satuan	Total Harga
Reagen formalin	1 kit	2,508,000.00	2,508,000.00
Petridish uk 90x15	10 buah	41,800.00	418,000.00
Gelas piala	6 buah	49,500.00	297,000.00
Batang pengaduk kaca	3 buah	29,700.00	89,100.00
Tabung reaksi 10 ml	20 buah	14,300.00	286,000.00
Gelas ukur uk 100 ml	2 buah	203,500.00	407,000.00
Gelas ukur uk 250 ml	2 buah	324,500.00	649,000.00
Plastik sampel	3 buah	110,000.00	330,000.00
Happa larva	2 buah	105,000.00	210,000.00
Lukah	10 buah	22,500.00	225,000.00
Ijuk	11 ball	20,000.00	220,000.00
Papan	10 helai	45,000.00	450,000.00
Kayu	10 btg	32,500.00	325,000.00
Paku	2 kg	22,500.00	45,000.00
Terpal	3 lbr	312,500.00	937,500.00
Hannoch	26 buah	32,000.00	832,000.00
Fitting	4 buah	25,000.00	100,000.00
L	12 buah	1,250.00	15,000.00
Kabel	2 rol	200,000.00	400,000.00
Klem	2 buah	13,000.00	26,000.00
Tekong	6 buah	11,500.00	69,000.00
Tedos	4 buah	4,000.00	16,000.00
Stop kontak TB	3 buah	1,500.00	4,500.00
Stop kontak TP	4 buah	20,000.00	80,000.00
Saklar	2 buah	20,000.00	40,000.00
Pipa	8 btg	9,000.00	72,000.00
Batu aerator	10 buah	11,500.00	115,000.00
Blitz ICHT	5 buah	11,500.00	57,500.00
Cabang control	10 buah	5,750.00	57,500.00

- Aset ekstra komptabel tahun 2018 sebesar Rp.5.015.900,00 merupakan Belanja Modal tahun 2018 yang tidak dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdiri dari:

Nama Barang		Harga Satuan	Total Harga
Pinset anatomi	2 buah	132,000.00	264,000.00
Lumpung besar/alu	2 set	368,500.00	737,000.00
Pinset splinter	2 buah	173,800.00	347,600.00
Rak tabung reaksi	1 buah	507,100.00	507,100.00
Spatula with spoon	2 buah	165,000.00	330,000.00
Blender	1 buah	737,000.00	737,000.00

Pisau set	2	set	275,000.00	550,000.00
Box sampel	12	buah	44,000.00	528,000.00
Timbangan digital	1	buah	265,000.00	265,000.00
Talenan	2	buah	41,800.00	83,600.00
Tas cool box	1	buah	666,600.00	666,600.00

### 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.3.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>15.233.551.909,31</b>	<b>15.701.721.531,98</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perikanan periode 31 Desember 2017 dan 2016 setelah dikurangi dengan kewajiban atau Akumulasi Penyusutan. Rincian Ekuitas Awal tersebut antara lain:

1.	Jumlah Aset lancar	748.471.900,00	1.423.110.147,00
2.	Jumlah Aset tetap	14.453.989.044,31	14.250.616.446,98
3.	Jumlah Aset Lainnya	33.095.400,00	29.450.000,00
	Jumlah Aset	15.235.556.344,31	15.703.176.593,98
4.	Jumlah kewajiban	2.004.435,00	1.455.062,00
	<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>15.233.551.909,31</b>	<b>15.701.721.531,98</b>

Jumlah Aset Lancar sebesar Rp.748.471.900,00 dan Rp. 1.423.110.147,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016.

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp.14.453.989.044,31 dan 14.250.616.446,98 terdiri dari :

-	Tanah	2.147.873.150,00	2.147.873.150,00
-	Peralatan dan Mesin	1.446.646.528,62	2.031.191.739,41
-	Gedung dan Bangunan	7.390.824.573,02	6.624.582.948,24
-	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.790.161.316,67	2.801.170.133,33
-	Aset Tetap Lainnya	678.483.476,00	645.798.476,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.453.989.044,31</b>	<b>14.250.616.446,98</b>

Nilai Aset Lainnya sebesar Rp.33.095.400,00 dan Rp. 29.450.000,00 terdiri dari:

- Aset lain-lain (Kendaraan Rusak Berat)	3.645.400,00	2.800.000,00
- Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	2.650.000,00	2.650.000,00
- Aset lain-lain (Barang Milik Provinsi)	26.800.000,00	
- Aset lain-lain (Barang Milik Negara)		24.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.095.400,00</b>	<b>29.450.000,00</b>

Nilai Kewajiban sebesar Rp.2.004.435,00 dan Rp. 1.455.062,00 terdiri dari :

- Listrik	876.086,00	867.385,00
- Air	134.510,00	180.680,00
- Internet	946.690,00	406.997,00
- Telfon	47.147,00	
<b>Jumlah</b>	<b>2.004.435,00</b>	<b>1.455.062,00</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.3.2</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(6.385.527.995,21)</b>	<b>(8.571.298.729,67)</b>

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 berupa :

- Pendapatan-LO	145.000.000,00	133.150.000,00
- Beban-LO	6.530.527.995,21	8.704.448.729,67
<b>Jumlah</b>	<b>(6.385.527.995,21)</b>	<b>(8.571.298.729,67)</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.3.3</b>	<b>R/K PPKD</b>	<b>6.846.749.308,00</b>	<b>7.932.074.385,00</b>

R/K PPKD merupakan jumlah belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 yang belanjanya bersumber dari penerbitan SP2D UP/GU/LS/TU.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.3.4	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan</b>	<b>(0,00)</b>	<b>171.054.722,00</b>

Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
- <b>Mutasi Tambah Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>197.451.772,00</b>

- a. Jumlah tersebut merupakan jumlah mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2017. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.197.451.772,00 merupakan mutasi barang masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 024/327/umum-LK/2017 tanggal 29 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut :

PH meter sebanyak 1 unit	Rp	467.760,00
DO meter sebanyak 1 unit	Rp	3.238.680,00
Hand phone sebanyak 3 unit	Rp	3.807.772,00
Laptop sebanyak 8 unit	Rp	59.848.000,00
Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit	Rp	103.759.200,00
Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit	Rp	13.380.360,00
Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit	Rp	12.950.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>197.451.772,00</b>

Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
- <b>Koreksi Kurang Aset Ekstra Komptabel</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(26.397.050,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah koreksi kurang aset ekstra komptabel pada tahun 2017. Pengurangan Aset terjadi pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2017 dengan nilai Rp.26.397.050,00. dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Koreksi kurang Aset Ekstra Komptabel dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2017, uraian sebagai berikut :

Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Harga Barang
Kursi Rapat	2004	16	Rp 2.880.000,00
Kursi Rapat	2009	50	Rp 14.750.000,00
Kursi Biasa	2004	50	Rp 3.580.000,00
Kursi Biasa	2010	30	Rp 1.584.000,00
Kipas Angin	2012	2	Rp 500.000,00

Kipas Angin	2013	5	Rp	1.300.000,00
Thermometer	2013	2	Rp	221.250,00
Sabit	2017	3	Rp	165.000,00
Cangkul	2017	3	Rp	264.000,00
Sekop	2017	3	Rp	231.000,00
Garpu	2017	3	Rp	165.000,00
Baju labor	2017	2	Rp	558.800,00
Tabung centrifuge	2017	5	Rp	198.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp</b>	<b>26.397.050,00</b>

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.3.5	Ekuitas Akhir	15.694.773.222,10	15.233.551.909,31

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2018 dan 2017.

#### 5.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.1	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	145.000.000,00	133.150.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam TA 2018 dan 2017 yang terdiri dari jenis-jenis retribusi berikut :

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.050.000,00	100.500.000,00
-	Retribusi Penjualan Benih Ikan	22.950.000,00	32.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>133.150.000,00</b>

Jumlah realisasi Tahun 2018 dan 2017 mencapai 51,71% dan 90,58% dari anggaran sebesar Rp.280.400.000,00 dan Rp. 147.000.000,00. Secara total terdapat peningkatan jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.11.850.000,00 atau naik 8,90% dari tahun 2017.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.2	Belanja Pegawai	2.449.176.171,00	2.737.185.734,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

-	Gaji dan tunjangan	1.961.645.142,00	2.347.680.984,00
-	Tambahan Penghasilan PNS	446.520.029,00	261.401.750,00
-	Uang Lembur	41.011.000,00	128.103.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.449.176.171,00</b>	<b>2.737.185.734,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017 masing-masing mencapai 92,13% dan 98,92% dari anggaran sebesar Rp.2.658.359.328,00 dan sebesar Rp.2.767.137.362,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.4.3</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.550.334.737,00</b>	<b>2.330.972.451,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Honorarium PNS	154.100.000,00	174.400.000,00
Honorarium Non PNS	925.000,00	11.000.000,00
Belanja BahanPakai Habis	99.313.150,00	50.768.100,00
Belanja Bahan/Material	115.488.550,00	187.577.400,00
Belanja Jasa Kantor	411.246.497,00	403.642.601,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.655.550,00	308.990.298,00
Belanja Cetak	34.885.400,00	47.721.300,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Alat Berat		
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.287.500,00	13.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	47.327.500,00	58.685.000,00
Belanja PakaianKhusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	0,00
Belanja PerjalananDinas	464.511.090,00	840.623.752,00
Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	38.494.500,00	194.034.500,00
Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	957.500,00
Belanja Jasa Konsultansi		39.072.000,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 masing-masing mencapai 98,22% dan 99,35% dari anggaran sebesar Rp.1.578.487.850,00 dan sebesar Rp. 2.346.174.400,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>5.4.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>1.541.056.400,00</b>	<b>1.756.641.800,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi Belanja Hibah dalam tahun 2018 dan 2017 masing-masing mencapai 87,82% dan 99,59% dari anggaran sebesar sebesar Rp.1.754.842.000,00 dan Rp. 1.763.827.013,00. Belanja Hibah berupa pemberian hibah barang kepada Masyarakat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.



No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.5	<b>Belanja Tanah</b>	<b>1.215.186.000,00</b>	<b>670.105.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tanah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi Belanja Tanah tersebut mencapai 99,88% dan 99,99% dari jumlah yang dianggarkan tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.1.216.702.742.000,00 dan Rp. 670.197.000,00. Rincian realisasi adalah sebagai berikut :

Belanja modal pengadaan kolam ikan	1.215.186.000,00	670.105.000,00
------------------------------------	------------------	----------------

Terdapat Belanja Modal Tanah yang direklasifikasi keluar ke Gedung dan Bangunan senilai Rp.859.171.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.356.015.000,00. Ini disebabkan realisasi Belanja Modal di Belanja Modal Tanah tetapi pencatatannya di Aset Tetap Gedung & Bangunan dan Jalan, Irigasi & Jaringan.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.6	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>60.797.000,00</b>	<b>85.398.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dan 2017 mencapai 100,00% dan 99,92% dari jumlah anggaran sebesar Rp.60.797.000,00 dan sebesar Rp. 85.467.997,00,00. Jumlah realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017, dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar		13.002.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	5.000.000,00	22.790.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	30.000.000,00	510.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat pemeliharaan	4.297.000,00	3.996.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah	1.500.000,00	1.175.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer		2.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi		8.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	7.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium		25.575.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>60.797.000,00</b>	<b>85.398.000,00</b>

Pada realisasi Belanja Peralatan dan Mesin terdapat belanja yang tidak dikapitalisir menjadi Aset Tetap sebesar Rp.9.281.100,00 dan Aset Ekstra Kompatibel TA 2018 sebesar Rp.5.015.900,00 seperti yang sudah dijelaskan pada pos neraca Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.7	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>92.072.000,00</b>	<b>444.329.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tersebut mencapai 99,94% dan 99,90% dari jumlah yang dianggarkan tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.92.125.000,00 dan Rp. 444.329.000,00. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	92.072.000,00	299.734.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Gerbang/Gapura		144.595.000,00

Pada realisasi Belanja Gedung dan Bangunan terdapat belanja yang tidak dikapitalisir menjadi Aset Tetap sebesar Rp.15.111.000,00 seperti yang sudah dijelaskan pada pos neraca Akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.8	<b>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>26.587.000,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan untuk belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jumlah realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 mencapai 99,95% dari jumlah yang dianggarkan tahun sebesar Rp.26.600.000,00. Rincian belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	26.587.000,00	0,00
---	---------------	------

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.9	<b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>56.540.000,00</b>	<b>40.592.400,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut mencapai 99,86% dan 99,98% dari jumlah yang dianggarkan tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.56.620.000,00 dan Rp. 40.600.000,00. Rincian belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Hewan	56.540.000,00	40.592.400,00
----------------------------------	---------------	---------------

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah. Salah satu dinas yang dibentuk adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan pemekaran dari Dinas Peternakan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. TUGAS POKOK**

Tugas Pokok yang diemban Dinas Perikanan menurut Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Adapun penjabaran dari Tugas Pokok Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin Dinas Perikanan.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan dibidang perikanan.
- c. Memfasilitasi usaha dibidang perikanan.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang perikanan.

#### **C. FUNGSI.**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Mengkoordinir aparatur perikanan dalam melaksanakan tugas.
- b. Mengkoordinir pelayanan umum di bidang perikanan.
- c. Memberikan fasilitas untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha di bidang perikanan.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan teknis di bidang perikanan.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian teknologi di bidang perikanan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang perikanan.
- g. Pelaksanaan kebijakan umum peningkatan kelembagaan perikanan, pembudidayaan perikanan serta permodalan.
- h. Pelaksanaan pengelolaan hasil perikanan.
- i. Pengawasan investasi perikanan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - Seksi Pengelolaan Kawasan Budiaya
  - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  - Seksi Budidaya Ikan
- d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Perikanan
  - Seksi Pendataan dan Perizinan Usaha
  - Seksi Pemanfaatan Perairan Umum
  - Seksi Pengolahan dan Promosi
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan.
  - Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha
  - Seksi Fasilitasi Kemitraan dan IPTEK
  - Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

UPTD Dinas Perikanan :

1. UPTD BBI Dinas Perikanan

Untuk jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Tahun 2018.

#### E. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH.

Aspek strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang berdasarkan Perda Nomor : 66 Tahun 2016.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan 31 Desember 2018 sebanyak 27 orang dengan perincian sebagai berikut:

➤ Pegawai Golongan IV	6 Orang
➤ Pegawai Golongan III	20 Orang
➤ Pegawai Golongan II	<u>1 Orang</u>
Jumlah	27 Orang.

Tenaga Harian Lepas sebanyak : 26 Orang yang berada pada Dinas Perikanan, UPTD BBI Tarantang, BBI Tanjung Balik dan BBI Aia Putih.

**F. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat kendala-kendala yang berarti. Kendala terjadi ketika pelaksanaan pergeseran APBD yang baru disahkan diakhir bulan Oktober 2018, namun dengan dukungan bersama struktur yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi keuangan 93,92%.

## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Perikanan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berisikan antara lain Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun realisasi Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	2.658.359.328,00	2.449.176.171,00	92,13
Belanja Barang	1.578.487.850,00	1.550.334.737,00	98,22
Belanja Hibah	1.754.842.000,00	1.541.056.400,00	87,82
Belanja Modal :			
Belanja Modal Tanah	1.216.702.742,00	1.215.186.000,00	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.797.000,00	60.797.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.125.000,00	92.072.000,00	99,94
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.600.000,00	26.587.000,00	99,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.620.000,00	56.540.000,00	99,86
<b>Jumlah</b>	<b>7.444.533.920,00</b>	<b>6.991.749.308,00</b>	<b>93,92</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Sarilamak,            Februari 2019

